

RINGKASAN

RIZKI FEBRYAN IRKA
227410101032 **PERAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE (Dr. Muhammad Nur.,S.H., M.H. Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum)**

Sebuah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terkait penyimpanan barang bukti narkotika. Praktik menyimpan barang bukti di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), meskipun disebabkan oleh ketiadaan RUPBASAN di wilayah tersebut, bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kesenjangan ini menimbulkan dilema serius karena mengancam kepastian hukum, integritas barang bukti, dan akuntabilitas pejabat, serta berisiko pada penyalahgunaan dan proses pembuktian di pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan Narkotika pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, untuk mengkaji kendala oleh penuntut umum dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang dilakukan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sumber data dalam penelitian ini berasal dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data melalui metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menemukan masalah serius dalam penyimpanan barang bukti narkotika. Praktik penyimpanan di luar fasilitas resmi (RUPBASAN) akibat ketiadaannya di wilayah tersebut, bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hal ini menciptakan dilema dalam penegakan hukum karena menimbulkan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian tempat, masalah biaya, dan prosedur pemusnahan yang rumit. Akibatnya, praktik ini tidak hanya menghambat efisiensi kerja, tetapi juga merusak prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas pejabat.

Disarankan kepada Pemerintah pemerintah agar melakukan solusi fundamental jangka panjang melalui percepatan pembangunan dan fungsionalisasi RUPBASAN, Penerbitan payung hukum sementara yang jelas selama RUPBASAN belum tersedia dan Optimalisasi prosedur penyerahan dan pengelolaan barang bukti.

Kata Kunci : *Penuntut Umum, Barang Bukti, Narkotika*

SUMMARY

RIZKI FEBRYAN IRKA
227410101032 **THE ROLE OF PUBLIC PROSECUTORS IN THE STORAGE AND DESTRUCTION OF NARCOTICS EVIDENCE AT THE LHOKSEUMAWE DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE**
(Dr. Muhammad Nur.,S.H., M.H. Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum)

A study reveals a gap between theory and practice in law enforcement at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office regarding the storage of narcotics evidence. The practice of storing evidence outside the State's Repository for Seized Assets (RUPBASAN), although stemming from the lack of such a facility in the area, conflicts with Article 44, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Law No. 35 of 2009. This discrepancy creates a serious dilemma, as it jeopardizes legal certainty, the integrity of evidence, and the accountability of officials, while also risking misuse and compromising the judicial process.

This study is a juridical-empirical research conducted within the jurisdiction of the Lhokseumawe District Prosecutor's Office, using a statute approach, and to analyze the obstacles faced by public prosecutors in the storage and destruction of narcotics evidence at the Lhokseumawe District Attorney's Office.

The research employs an empirical juridical methodology with a statute approach, conducted within the legal jurisdiction of the Lhokseumawe District Attorney's Office. Data sources for this study are derived from two primary categories: primary data and secondary data. Data collection techniques utilized include interviews, documentation, and observation, with data analysis conducted through a descriptive method.

Research at the Lhokseumawe District Prosecutor's Office reveals a serious problem with the storage of narcotics evidence. The practice of storing evidence outside the official facility (RUPBASAN) due to its absence in the region contradicts the principles of a state governed by the rule of law. This practice creates a dilemma for law enforcement, as it presents various obstacles such as unsuitable storage locations, cost issues, and complicated destruction procedures. Consequently, these challenges not only hinder the efficiency of law enforcement but, more fundamentally, erode the principle of legal certainty and have significant implications for the accountability of officials.

It is recommended that the Government implement fundamental long-term solutions through the acceleration of RUPBASAN construction and functionalization, the issuance of clear temporary legal umbrella provisions while RUPBASAN facilities are not yet available, and the optimization of procedures for the submission and management of evidence.

Keywords : Public Prosecutor, Evidence, Narcotics